

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Ainul Haq

NPP. 31.0852

Asdaf Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: ainulhaq300300@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This research is based on the problems of the Morowali Regency Regional Financial and Asset Management Agency where the Budget Performance is still classified as less effective and efficient. This provides the view that the Regional Financial Management of Morowali Regency has not been managed optimally, especially in the areas of planning and budget preparation which have not been effective and efficient. Apart from that, an analysis of the annual expenditure budget performance is also required, which consists of calculating expenditure variance, expenditure growth, expenditure harmony and expenditure efficiency.* **Purpose:** *The aim of this research is to describe the causes of the less than optimal budget performance of the Morowali Regency Regional Financial and Asset Management Agency for 2018-2022. The data used is the Budget Realization Report (LRA) of the Morowali Regency Regional Financial and Asset Management Agency for 2018-2022.* **Method:** *This research method uses a qualitative approach and inductive thinking. With data collection techniques, namely interviews with 4 people from the Regional Financial and Asset Management Agency of Morowali Regency as well as documentation with related documents.* **Results/Findings:** *The findings from this research show that the percentage of each analysis shows that the Regional Financial and Asset Management Agency of Morowali Regency from 2018-2022 is classified as poor.* **Conclusion:** *The percentage of the results of the analysis of the Morowali Regency Regional Financial and Asset Management Agency's Expenditure Budget Performance from 2018-2022 is still classified as poor, this is because the allocated Expenditure Budget cannot be managed well in the planning process, causing there to be programs/activities that are not implemented, and actual expenditure is lower than the budget that has been set. The effort to overcome this is that the Regional Financial and Asset Management Agency needs to conduct a performance evaluation of expenditures each year to identify factors that cause the performance of the expenditure budget to be classified as poor, then strengthen supervision and control of the expenditure budget to make it more effective and efficient, including at the planning and budget preparation stages.*

Keywords: *Budget Performance, Effectiveness, Efficiency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasari dari permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dimana Kinerja Anggaran Belanjanya masih tergolong kurang efektif dan efisien. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali belum dikelola secara maksimal terutama dibidang perencanaan dan penyusunan anggaran yang belum efektif dan efisien. Selain itu juga diperlukan Analisis terhadap Kinerja Anggaran Belanja tiap tahunnya yang terdiri dari perhitungan Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, dan Efisiensi Belanja. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab kurang maksimalnya kinerja anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali tahun 2018-2022. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan cara berpikir induktif. Dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan 4 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali serta dokumentasi dengan dokumen terkait. **Hasil/Temuan:** Temuan dari penelitian ini didapati bahwa persentasi dari tiap analisis menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018-2022 tergolong kurang baik. **Kesimpulan:** Persentasi dari hasil analisis Kinerja Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018-2022 masih tergolong kurang baik hal ini dikarenakan Anggaran Belanja yang sudah dialokasikan tidak dapat dikelola dengan baik dalam proses perencanaan sehingga menyebabkan terdapat program/kegiatan yang tidak terlaksana, dan realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran yang telah di tetapkan. Upaya Mengatasinya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap pengeluaran tiap tahunnya untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kinerja anggaran belanja tergolong kurang baik, kemudian memperkuat pengawasan dan pengendalian anggaran belanja agar lebih efektif dan efisien, termasuk pada tahap perencanaan dan penyusunan anggaran belanja.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran Belanja, Efektivitas, Efisiensi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah, yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan lokal. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan proses penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan (akuntansi) APBD, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Melalui pengelolaan anggaran daerah, pemerintah dan masyarakat dapat menilai kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja, serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas, seperti yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat mewajibkan setiap instansi pemerintah daerah untuk mengelola dan melaksanakan anggaran dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk ketaatan dan disiplin terhadap wewenang yang diberikan. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelola melalui beberapa tahap, yang meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan digunakan dalam tahun-tahun mendatang.

Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter atau satuan lain untuk periode tertentu. Secara sederhana, anggaran merupakan rincian rencana atau program organisasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas selama periode tertentu yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan.

Afiah (2020 :7) berpendapat mengenai anggaran yang didefinisikan sebagai pedoman untuk kegiatan yang akan dijalankan oleh Pemerintah, yang mencakup rencana terhadap pendapatan, kegiatan belanja, transfer, dan pembiayaan yang pengukurannya dapat dihitung dengan satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Khusaini & Nurkholis (2019:7) anggaran adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun) yang merupakan instrumen utama bagi Pemerintah dalam pelaksanaan aktivitas atau program dari Pemerintah.

Menurut Suparmoko dalam Wulandari & Iryanie (2018: 8) pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran yang berisi tentang pernyataan terperinci tentang jenis anggaran dan jumlah penerimaan, serta perkiraan jenis dan jumlah pengeluaran yang diharapkan dalam periode satu tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan kestabilan ekonomi daerah, memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien juga akan memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah yang harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali merupakan sebuah Lembaga teknis yang mempunyai peran penting dalam hal proses Penyusunan Anggaran Belanja Daerah, khususnya dalam penetapan penggunaan Anggaran dan Pengeluaran Dana di instansinya. Dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan pembentukan anggaran daerah, BPKAD memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif. Evaluasi kinerja Anggaran juga dilakukan dengan membandingkan anggaran yang telah disetujui dengan realisasi yang sebenarnya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belanja instansi selama satu tahun anggaran berlangsung. Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kendala yang membuat sistem penganggaran belanja menjadi kurang efektif, terutama Ketika acuan untuk penganggaran tidak selalu dapat dikelola dengan baik dalam proses perencanaan anggaran itu sendiri. Kinerja Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang masih tergolong kurang baik khususnya dari tahun 2018-2022 yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Selama kurun waktu tersebut, BPKAD juga mengalami beberapa kendala dalam penyusunan anggaran yang akurat dan tepat sasaran, sehingga menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien, Hal ini mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran dan kurangnya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 1
Anggaran Belanja Kabupaten Morowali 2018 -2022

Tahun	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Lainnya (Rp)	Total Belanja (Rp)
2018	293.148.654.171	368.716.319.765	387.716.768.104	248.708.107.301	1.298.289.849.342
2019	295.145.506.614	307.813.356.001	500.332.635.826	600.219.208.127	1.272.051.756.985
2020	440.261.469.991	448.633.055.128	392.701.077.335	387.238.948.303	1.314.485.992.514
2021	296.149.673.273	294.832.325.674	294.780.320.679	299.113.333.592	1.481.811.153.185
2022	240.495.107.108	263.207.255.711	293.997.119.345	303.475.439.114	1.590.046.929.136

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali 2023

Berdasarkan data Belanja Kabupaten Morowali Tahun 2018 mengalami penurunan total belanja sedangkan Tahun 2019,2020,2021, dan 2022, Pemerintah Kabupaten Morowali mengalami kenaikan Total Belanja disetiap tahunnya. Dapat dianalisa bahwa Pemerintah

Kabupaten Morowali melakukan kenaikan anggaran belanja di beberapa jenis belanja. Pada Belanja Barang dan Jasa ditahun 2020-2022 mengalami kenaikan anggaran belanja yang cukup signifikan yaitu kurang lebih 300 milyar. Pada Belanja pegawai mengalami kenaikan ditahun 2019 dan 2020 sedangkan ditahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Belanja lainnya mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

Hasil analisis ini digunakan untuk menilai kinerja instansi dalam mengelola anggaran belanja. Dalam hal ini, besarnya varians antara anggaran belanja dan realisasinya diukur baik dalam bentuk nominal maupun persentase, dengan merujuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja. Analisis ini membantu dalam menilai sejauh mana efektivitas instansi dalam mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran untuk aktivitas mereka selama satu tahun anggaran tertentu. Evaluasi kinerja anggaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Varians Belanja.

Tabel 1. 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali 2018-2022

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2018	270.419.248.542	205.132.103.243	75,86 %
2019	256.470.132.322	222.529.385.280	86,77 %
2020	281.634.732.435	246.945.036.712	87,68 %
2021	275.973.532.602	266.133.302.635	96,43 %
2022	249.837.961.476	214.337.753.040	85,79 %

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten morowali 2024

Berdasarkan data tabel 1.2 terlihat bahwa ditahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan kemampuan realisasi anggaran belanja, Tetapi ditahun 2022 terjadi penurunan realisasi anggaran belanja. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dan merupakan tahun dengan realisasi anggaran yang paling rendah. Terdapat penambahan anggaran belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020 tetapi terdapat pengurangan anggaran belanja dari tahun 2020 ke tahun 2022.

Adanya penambahan anggaran belanja yang signifikan ditahun 2020 seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan realisasinya, justru pada tahun 2021 terdapat pengurangan anggaran belanja tetapi realisasinya yang meningkat. Pada tahun 2022 juga terjadi pengurangan anggaran belanja dan terjadi penurunan realisasi anggaran. Dari presentasi tersebut terlihat bahwa penyerapan anggaran untuk mendukung kegiatan Pembangunan tidak terserap seluruhnya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti terdapat indikasi program/kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana, realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagainya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam analisis kinerja anggaran belanja maupun Tingkat realisasi anggaran belanjanya. Penelitian Dewi Sartika berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara, menemukan bahwa kinerja pertumbuhan anggaran belanja BAPPEDA menunjukkan performa yang positif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,35% dari tahun 2014 hingga 2016. Analisis varians belanja menunjukkan adanya efisiensi, dengan varians belanja mencapai 90,00% pada tahun 2014, 87,95% pada tahun 2015, dan 92,53% pada tahun 2016. Prioritas pengeluaran belanja BAPPEDA cenderung lebih terfokus

pada belanja operasional, mencapai 96,25%, sementara belanja modal hanya mencapai 3,74%. Penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, Kinerja anggaran terbukti cukup baik dengan adanya pertumbuhan anggaran setiap tahun dan penghematan anggaran yang berhasil diperoleh melalui analisis varians. Perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang adalah penggunaan konsep teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi (2019). Kemudian letak perbedaan yang berfokus pada penelitian ini yaitu menitikberatkan pada identifikasi hambatan dalam kinerja anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian Sakina Tantri yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 menemukan bahwa kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016 dapat dikatakan baik. Analisis varians belanja dan pertumbuhan belanja menunjukkan kinerja yang baik, serta analisis keserasian belanja menunjukkan adanya harmonisasi dalam belanja daerah. Selain itu, dinas tersebut juga telah melakukan efisiensi dengan tidak menggunakan anggaran melebihi realisasinya, meskipun ada program yang tidak berjalan secara efisien. Namun, dalam hal efektivitas penggunaan anggaran belanja tidak langsung, dinas tersebut dinilai efektif. Secara keseluruhan, kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai baik. Secara parsial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Namun, pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang adalah penggunaan konsep teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi (2019). Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada identifikasi hambatan dalam kinerja anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian Kukuh Prastianin grum yang berjudul Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada pemerintah kota bogor) menemukan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Namun, pelaksanaan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang adalah penggunaan Analisis terhadap Rasio Varian Belanja, Pertumbuhan Belanja, keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja dengan mengadopsi konsep teori rasio keuangan oleh Mahmudi (2019).

Penelitian Resky Septiyan yang berjudul Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada SKPD Kabupaten Bogor) menemukan bahwa Perencanaan dan pelaksanaan anggaran sendiri tidak langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran serta evaluasi kinerja memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara bersamaan, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, serta evaluasi kinerja berkontribusi terhadap akuntabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang adalah penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis Rasio Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja dengan mengadopsi konsep teori rasio keuangan oleh Mahmudi (2019).

Penelitian Sefira Dewi wulandari yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014-2016 menemukan bahwa Pengukuran dengan perspektif keuangan terhadap kinerja anggaran masuk kategori efektif karena mampu meningkatkan sumber PAD, dan dikatakan efisien. Dengan detail tahun

2014 mencapai 93,49 %, tahun 2015 sebesar 90,42% dan 2016 sebesar 94,22% dan anggaran belanja yang diserap maupun digunakan sesuai dengan target. Hasil pengukuran kinerja non-keuangan masuk kategori baik karena selalu mengalami peningkatan.

Penelitian Sari yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda menemukan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 cukup bervariasi, namun masuk ke dalam kriteria kurang efektif. Sementara rata-rata tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja secara keseluruhan sudah efisien.

Penelitian Saraswati yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Timur) menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Dari kuisioner yang disebar, diketahui bahwa kinerja perencanaan dan penganggaran di daerah Jawa Timur masih rendah. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan di daerah Jawa Timur relatif kurang efektif dan efisien.

Penelitian Susanti Juanda yang berjudul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru menemukan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan atas belanja modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan pencatatan berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, Dimana konteks penelitian yang dilakukan mengenai Analisis terhadap Kinerja Anggaran Belanja dan melihat seberapa efektif dan efisien realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan cara berpikir induktif. Selanjutnya pengukuran atau indikator yang digunakan yaitu pendapat dari Mahmudi (Mahmudi 2019) yang memaparkan Analisis terhadap Kinerja Anggaran Belanja yang terdiri dari Analisis Varians, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Analisis Efisiensi Belanja. Perbedaan lainnya adalah Penulis fokus membahas Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.

1.5. Tujuan

Tujuan Dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran mengenai penyebab kurang baiknya Kinerja Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 serta Faktor-faktor Penghambat dan Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi Hambatan tersebut.

2. METODE

Metode yang diambil penulis untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar dapat memperoleh data dan informasi sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Arikunto dalam Nurdin & Hartati (2019:171) menyatakan bahwa sumber data merupakan subyek asal dimana data didapatkan. Pemahaman mengenai sumber data adalah suatu hal penting untuk dipahami untuk mengantisipasi munculnya kesalahan dalam melakukan pemilihan sumber data. Seperti adanya tidak selarasnya sumber data dengan penelitian.

Mukhtazar (2020: 63) mengelompokkan sumber data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya dan diambil dari sumber yang telah ada.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan Dokumentasi yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Pada data primer dilakukan melalui wawancara terhadap Pejabat yang terkait, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali, Kepala Bidang Anggaran, dan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, sedangkan pada data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali tahun 2018-2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mahmudi (2019: 154) terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan khususnya dalam analisis anggaran belanja, antara lain:

1. Analisis Varians Belanja, analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang tersedia.
2. Analisis Pertumbuhan Belanja, analisis pertumbuhan menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keberhasilan dalam perencanaan dan realisasi anggaran yang mampu dilaksanakan dari periode ke periode berikutnya.
3. Analisis Keserasian Belanja, analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja.
4. Rasio Efisiensi Belanja, rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Penulis melakukan analisis mengenai Kinerja Anggaran Belanja menggunakan Rasio Keuangan sebagai dasar perhitungan menggunakan pendapat Mahmudi melalui Analisis Varians, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Analisis Efisiensi Belanja. Adapun Pembahasan dapat dilihat pada Subbab berikut:

3.1 Analisis Varians Anggaran Belanja Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merupakan Analisis yang menghitung selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Analisis Varian Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber: Mahmudi (2019:154)

Setelah menganalisis anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018 hingga 2022, evaluasi varians belanja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

- a. Varians menguntungkan (*Favourable Variance*), yaitu ketika realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Varians merugikan (*Unfavourable Variance*), yaitu ketika realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Analisis Varians Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians Belanja (Rp)	Penilaian
2018	270.419.248.542	205.132.103.243	65.287.145.299	<i>Favourable Variance</i>
2019	256.470.132.322	222.529.385.280	33.940.747.042	<i>Favourable Variance</i>
2020	281.634.732.435	246.945.036.712	34.689.695.723	<i>Favourable Variance</i>
2021	275.973.532.602	266.133.302.635	9.840.229.967	<i>Favourable Variance</i>
2022	249.837.961.476	214.337.753.040	35.500.208.436	<i>Favourable Variance</i>

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Analisis anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali periode 2018-2022 menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan pada 2019 dan 2020, dengan penyerapan anggaran masing-masing sebesar 86,77% dan 87,68%. Pada 2021, efisiensi mencapai puncaknya dengan penyerapan 96,43%, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penundaan atau pengurangan program tidak mendesak. Namun, pada 2022 terjadi penurunan efisiensi dengan penyerapan 85,79%, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan prioritas program yang memerlukan pengeluaran tak terduga. Dilihat dari penggunaan anggaran tahun 2018 sampai tahun 2022 dalam analisis Varians Belanja badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat disimpulkan bahwa, selisih penggunaan anggaran dapat dikatakan tergolong dalam selisih yang menguntungkan (*Favourable Variance*) dalam artian penggunaan anggaran belanja lebih rendah dari anggaran yang tersedia, walaupun dilihat dari presentase realisasi anggaran di tahun 2022 mengalami penurunan, apalagi ditahun 2018 yang masih banyak menyisakan anggaran yang tidak terealisasi. Meskipun demikian secara keseluruhan kinerja anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan baik, Dikarenakan untuk menghemat anggaran, sisa anggaran yang tidak digunakan akan menjadi surplus atau devisa pada tahun berikutnya.

3.2 Analisis Pertumbuhan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Analisis pertumbuhan belanja berguna untuk mengevaluasi apakah belanja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan. Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Belanja Thn_{t-1}

$$= \frac{\text{Rea. Belanja Thn}_t - \text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019:154)

Setelah menganalisis anggaran belanja operasional dan belanja modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan belanja dapat dinilai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pertumbuhan Belanja Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 2018-2022

Uraian	Realisasi Belanja Tahun <i>t</i> - 1 (Rp)	Realisasi Belanja Tahun <i>t</i> (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
2018-2019	205.132.103.243	222.529.385.280	+17.397.282.037	7,82%
2019-2020	222.529.385.280	246.945.036.712	+24.415.651.432	9,89%
2020-2021	246.945.036.712	266.133.302.635	+19.188.265.923	7,21%
2021-2022	266.133.302.635	214.337.753.040	- 51.795.549.595	24,17%

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan analisis pertumbuhan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan anggaran. Dari 2018 ke 2019, terjadi peningkatan sebesar Rp 17.397.282.037 (7,82%), dan dari 2019 ke 2020, peningkatan sebesar Rp 24.415.651.432 (9,89%). Pertumbuhan melambat dari 2020 ke 2021 dengan peningkatan sebesar Rp 19.188.265.923 (7,21%). Namun, pada periode 2021 ke 2022, terjadi penurunan anggaran yang signifikan sebesar Rp 51.795.549.595 (24,17%). Penurunan ini disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi alokasi anggaran, dengan dana lebih banyak diarahkan untuk penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan sektor kesehatan, serta penurunan pendapatan daerah yang mengharuskan penyesuaian anggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan anggaran belanja selama beberapa tahun, penurunan yang drastis pada tahun 2022 menunjukkan perlunya penyesuaian strategi anggaran yang lebih adaptif terhadap kondisi eksternal dan perubahan prioritas.

3.3 Analisis Keserasian Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Analisis keserasian belanja merupakan penilaian yang bermanfaat untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara prioritas belanja operasional dan belanja modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Analisis ini membantu dalam menentukan apakah keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal telah terwujud.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional dalam suatu organisasi, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Rasio ini dihitung

dengan membandingkan total anggaran belanja operasi dengan total anggaran belanja yang tersedia. Analisis rasio belanja operasi dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019/154)

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan belanja modal, terutama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini dilakukan dengan membandingkan total anggaran belanja modal dengan total anggaran belanja yang tersedia. Analisis rasio belanja modal dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019/154)

Perhitungan analisis keserasian antara belanja operasi dan belanja modal dalam tabel anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2018 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 3.3
Analisis Keserasian Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Presentase Rasio (%)	
				Operasi	Modal
2018	17.908.489.117,00	14.924.726.117,00	2.983.763.000,00	83,33%	16,66%
2019	14.136.349.895,65	11.813.294.895,65	2.323.055.000,00	83,56%	16,43%
2020	16.340.726.458,90	13.318.807.458,90	3.021.919.000,00	81,50%	18,49%
2021	16.568.008.721,00	13.254.393.979,00	3.313.614.742,00	79,99%	20%
2022	20.150.675.667,58	16.858.846.861,31	3.291.828.806,27	83,66%	16,33%

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan data anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran lebih difokuskan pada belanja operasional, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai. Pada tahun 2018, sekitar 83,33% anggaran dialokasikan untuk belanja operasional, dan sisanya 16,66% untuk belanja modal. Tren serupa terlihat pada tahun 2019, dengan belanja operasional sebesar 83,56% dan belanja modal 16,43%. Tahun 2020 menunjukkan penurunan persentase belanja operasional menjadi 81,50%, sementara belanja modal meningkat menjadi 18,49%. Pada 2021, belanja operasional menurun lagi menjadi 79,99%, dengan belanja modal meningkat menjadi 20%, menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk aset tetap. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali pada belanja operasional menjadi 83,66%, dan penurunan belanja modal menjadi 16,33%. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan

bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan belanja modal pada beberapa tahun, prioritas utama tetap pada belanja operasional, khususnya belanja pegawai. Fluktuasi dalam rasio belanja modal mencerminkan perubahan dalam strategi alokasi anggaran yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan operasional yang mendesak dan kondisi eksternal.

3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Analisis Efisiensi Belanja merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengeluaran anggaran telah efisien dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rasio efisiensi belanja dihitung dengan membandingkan jumlah pengeluaran yang telah terjadi dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk pengeluaran tersebut. Perhitungan analisis efisiensi belanja dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019/154)

Dengan menggunakan rumus keserasian belanja, analisis terhadap tabel anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018 hingga 2022, dapat menghasilkan simpulan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2018	270.419.248.542	205.132.103.243	75,85%
2019	256.470.132.322	222.529.385.280	86,76%
2020	281.634.732.435	246.945.036.712	87,68%
2021	275.973.532.602	266.133.302.634	96,43%
2022	249.837.961.476	214.337.753.040	85,79%

Sumber: Mahmudi (2019/154)

Dari analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan dalam tingkat efisiensi. Pada tahun 2018, tingkat efisiensi mencapai 75,85% dengan penghematan yang signifikan, yang disebabkan oleh perencanaan anggaran yang ketat, pengendalian biaya yang efektif, dan kebijakan penghematan. Tahun 2019 menunjukkan peningkatan efisiensi menjadi 86,76%, dan tahun 2020 mencatat efisiensi sebesar 87,68%, menunjukkan tren peningkatan meskipun ada penurunan penghematan. Pada 2021, efisiensi mencapai puncaknya pada 96,43%, yang berarti penggunaan anggaran meningkat secara signifikan, namun menandakan penurunan dalam penghematan karena perubahan prioritas dan kebijakan, serta dampak pandemi COVID-19 yang mengalihkan fokus anggaran. Tahun 2022 menunjukkan penurunan efisiensi menjadi 85,79%, namun tetap dalam kategori cukup efisien. Secara keseluruhan, meskipun ada tahun-tahun dengan efisiensi tinggi, perubahan prioritas dan

kondisi eksternal seperti pandemi memainkan peran penting dalam fluktuasi efisiensi penggunaan anggaran.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama terkait analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali. Pertama, analisis pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 86,76%. Kedua, evaluasi tingkat efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran pada tahun 2021 memperlihatkan adanya upaya pengendalian biaya yang cukup berhasil, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan yang mempengaruhi optimalisasi anggaran. Ketiga, keserasian anggaran belanja menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, terutama pada beberapa program prioritas yang mengalami under atau over budgeting. Faktor utama yang menghambat kinerja anggaran belanja adalah kurangnya koordinasi antar unit kerja, yang berdampak pada ketidakselarasan dalam implementasi program dan penggunaan anggaran. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di BPKAD pada masa mendatang.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan menarik lainnya yang memberikan wawasan lebih mendalam terkait kinerja anggaran belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali. Salah satu temuan tersebut adalah adanya perbedaan signifikan dalam alokasi anggaran antar unit kerja di BPKAD yang tidak selalu mencerminkan prioritas strategis daerah. Hal ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali terhadap proses perencanaan anggaran untuk memastikan alokasi yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran masih terbatas, yang menyebabkan proses monitoring dan evaluasi menjadi kurang efektif. Penerapan sistem informasi yang lebih terintegrasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Terakhir, penelitian ini juga mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran masih minim, sehingga perlu ada upaya peningkatan keterlibatan publik untuk memastikan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan-temuan ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kinerja anggaran belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil yang kurang baik dalam kinerja anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan detail sebagai berikut :

1. Pada rentang tahun 2018 hingga 2022, varians realisasi anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali mengalami kenaikan dan penurunan, dengan selisih yang menguntungkan (Favourable Variance) disetiap tahunnya. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 dan masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2018.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja menunjukkan variasi setiap tahunnya. Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari 2018 hingga 2021 mengalami pertumbuhan positif, tetapi pertumbuhan anggaran ditahun 2020 hingga 2021 kembali melambat. Sedangkan ditahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan pertumbuhan anggaran belanja yang sangat signifikan sebesar Rp. -51.795.549.595.
3. Analisis Keserasian Anggaran Belanja dilakukan dengan membandingkan prioritas belanja antara belanja operasional dan belanja modal. Dari Hasil Analisis Keserasian Belanja menunjukkan bahwa proporsi belanja operasional lebih tinggi daripada belanja modal. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada masa mendatang, Dengan mengkaji kembali prioritas belanja antara belanja operasional dan belanja modal.
4. Evaluasi efisiensi penggunaan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2018 hingga 2022, melalui analisis efisiensi belanja, menunjukkan adanya kemampuan efisiensi hampir setiap tahun. Realisasi anggaran pada tahun 2018 dianggap efisien, sementara pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan penggunaan anggaran belanja namun masih dalam batas yang efisien. Pada tahun 2021, penggunaan anggaran belanja menurun dan dikategorikan kurang efisien, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan efisiensi dengan kategori cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan Kesimpulan yang telah dijelaskan dikemukakan di atas Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan dalam memperoleh data dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian Dimana waktunya hanya berlangsung selama dua minggu serta diperlukan kesesuaian waktu yang dimiliki oleh beberapa informan untuk melakukan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian di masa mendatang dapat lebih diperluas. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas. Selain itu, Penulis menyarankan agar kemudian hari dapat dilakukan penelitian lanjutan pada Lokasi yang serupa berkaitan dengan dengan analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali ditahun-tahun selanjutnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Prof. Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Marja Sinurat, MM selaku Ketua Program Studi Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Pembimbing Bapak Drs. Decky Dwi Utomo, MM. Serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Morowali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Afiah, N. Nur. 2020. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pada Entitas Akuntansi*. Jakarta: Kencana A.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta

- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mukhtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Nurkholis, M. & Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, Wulandari, & Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Sumber Jurnal:

- Prastianingrum, Kukuh and Sudarmanto, Ernadhi and Ilmiyono, Agung Fajar (2019) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor 2014-2017. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
- Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Timur). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1). 1020 – 1045.
- Sari, (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *KINERJA*, 15(1). 38 – 43.
- Sartika Dewi. 2018. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sumatera Utara”. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Septiyan, R. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Susanti, E. & Juanda, D. (2018). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru. *KOLEGIAL*, 6(1). 45 – 56
- Tantri, Sakina Nusarifa dan Putri Irmawati. 2018. Analisis Kinerja Anggaran Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol.1, No.1, Hal. 27-37
- Wulandari, S. Dewi. 2018. “Analisis Kinerja Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014-2016”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah